

Siaran pers

Ribuan Orang Kirimkan Surat Terbuka bagi Presiden, Desak Pertegas Penanganan Pandemi

Jakarta, 20 Juni 2021 – Walau terjadi penurunan kasus sampai pertengahan Mei lalu, lonjakan kasus drastis justru terjadi sejak pekan pertama Juni 2021. Pada 15 Juni lalu Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito bahkan menyebut terdapat 15 kabupaten/kota dengan kenaikan kasus tertinggi dan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan masing-masing peningkatan kasus mencapai 2.803 persen dan 715 persen kasus (*Detik*, 15/6).

Hal tersebut tidak mengherankan lantaran sejak pertengahan Mei lalu tingkat kemunculan kasus baru kian meninggi dan konsisten mencapai angka di atas 12.000 kasus sejak 17 Juni 2021 lalu. Ledakan kasus kian bertambah hingga mencapai 12.990 kasus pada 18 Juni 2021. Dampaknya, terjadi penumpukan pasien di rumah sakit pelayanan Covid-19. Lonjakan kasus yang mendadak menyebabkan sistem kesehatan nyaris kolaps karena tenaga kesehatan dan alat yang terbatas tidak selalu siap menghadapi lonjakan kasus.

Di sisi lain, masyarakat yang terinfeksi positif dan bergejala berat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Berita tentang pasien meninggal lantaran tidak mendapatkan fasilitas perawatan atau ketika melaksanakan isolasi mandiri menjadi populer dan diberitakan di media massa belakangan ini.

Lonjakan kasus belakangan ini dianggap wajar karena terjadi pasca hari besar yang kemudian menyebabkan mobilitas tinggi. Sebelumnya, peristiwa mobilisasi massal saat libur panjang kerap kali menambah kenaikan kasus yang drastis. Namun pemerintah tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Alih-alih, menerapkan kebijakan yang ketat, kebijakan larangan mudik hari raya Idul Fitri justru tidak tegas dalam substansi dan implementasinya. Peristiwa mobilisasi massal justru juga terjadi lantaran tidak tegasnya peraturan pemerintah dalam mengawasi mobilitas masyarakat, salah satunya dengan tidak melakukan karantina wilayah secara konsisten, yang menyebabkan tumpukan kasus dan berimbas terhadap ketahanan sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat begitu signifikan.

Berdasarkan hal itu, koalisi masyarakat sipil menggelar konferensi pers dan peluncuran surat terbuka berjudul ***Desakan Emergency Response-Prioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi*** pada Minggu (20/6). Surat desakan ini sebelumnya diedarkan secara daring sejak Jumat (18/6) lalu dan telah ditandatangani lebih dari 2.000 orang. Mereka terdiri atas akademisi, profesional, peneliti, tokoh-tokoh nasional, hingga kelompok kaum muda dan individu yang memiliki perhatian kuat atas ledakan kasus yang terjadi di berbagai daerah yang berimbas pada kolapsnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Tingginya antusiasme warga dalam mengisi petisi menunjukkan bahwa warga peduli akan kondisi pandemi dan ingin pemerintah mengambil tindakan tegas dalam memperketat mobilisasi

warga, khususnya ketika varian baru merebak dan melanda berbagai daerah. Pemerintah saat ini hanya memberitahukan di mana saja varian baru ditemukan, namun belum menunjukkan aksi nyata. Maka dari itu, petisi mendapat perhatian besar oleh warga. Beberapa pesan yang terkumpul dalam surat tersebut, di antaranya:

“Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Dan juga melakukan penutupan bandara untuk keluar dari wilayah Indonesia dan melarang warga negara asing untuk masuk ke negara Indonesia tanpa terkecuali.” (Mahasiswa).”

“Saya dukung petisi ini, situasi skrg makin gawat tp pemerintah terkesan tenang2 saja, kami petugas kesehatan di garis depan sudah mulai kewalahan. Sudah banyak kami menolak pasien yg butuh perawatan karena ketidaktersediaan ruang rawat. Sudah lebih dr 1 tahun, situasi yang seperti ini terulang lagi. (Dokter di Jakarta).”

“Saya survivor covid (Mei-Juni 2021) yang sejak awal pandemi WFH dan tidak ke mana-mana sama sekali. Covid sudah menyebar hingga kluster terkecil, yaitu keluarga. Saya mengapresiasi pemdes dan puskesmas yang tanggap dan memberikan dukungan kepada masyarakatnya. Akan tetapi yang paling penting seharusnya tindakan pencegahan oleh pemerintah pusat yang harus lebih giat lagi.” (Staff peneliti di Yogyakarta)

Konferensi pers ini turut menghadirkan tenaga kesehatan, pemerhati kebijakan hingga peneliti untuk memberikan pandangan, desakan, dan rekomendasi kepada pemerintah terhadap penanganan wabah yang bisa dianggap gagal selama ini.

Dalam pembukaannya, **Ahmad Arif** dari Lapor COVID-19, mengatakan persoalan keterbukaan data sangat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk terlibat dalam penanganan wabah. “Data yang ditampilkan pemerintah kerap tidak transparan, seperti tidak adanya data lacak dan tes yang ada di setiap daerah, angka kematian juga sangat *underreporting* sehingga masyarakat seolah menghadapi Covid-19 dalam peta buta. Saya melihat transparansi data ini menjadi kunci dalam respons warga menghadapi pandemi. Intinya, kami melihat tidak adanya kepemimpinan yang tegas dan jelas di tengah krisis multi-disiplin ini bahkan di saat rumah sakit nyaris kolaps saat ini, kita tidak melihat adanya *sense of crisis* yang ditunjukkan oleh pemimpin kita. Kita seolah berperang tanpa panglima.”

Hermawan Sulistyo, Anggota IAKMI, menjelaskan beragam permasalahan pemerintah dalam menangani wabah. “Selama 15 bulan perjalanan penanganan Covid-19 di Indonesia, sebenarnya ada banyak situasi yang bisa kita prediksi, tapi tidak mampu kita antisipasi. Pertama, dari aspek kebijakan, Indonesia termasuk negara yang belum punya kebijakan yang kuat dalam pengendalian Covid-19, tercatat kita hanya memiliki PP 201 tahun 2020 tentang PSBB. Akan tetapi, PSBB ini hanya ditetapkan tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, itupun dengan banyak modifikasi.”

Windyah Lestari, Relawan Lapor Covid-19, menjelaskan temuan aduan warga selama periode ledakan kasus beberapa minggu ke belakang. “Setidaknya dari 13 hingga 18 Juni ada 13 warga yang meminta bantuan untuk mencarikan rumah sakit dan ruang isolasi via *chatbot*. Di luar *chatbot* ada 5 warga yang meminta bantuan untuk mencari rumah sakit melalui *website* dan chat pribadi. Jika ditotal dalam 5 hari kami mendapat permintaan pertolongan karena terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 18 orang. Beberapa dari mereka alami gejala cukup berat sehingga perlu dibawa ke IGD. Lambatnya penanganan karena menipisnya *bed* bisa jadi juga terjadi di daerah lain. Kalau di Tangsel, dengan pelayanan kesehatan yang baik saja mengalami kesulitan menghadapi lonjakan kasus, bisa dibayangkan bagaimana di daerah lain.”

dr. Eva Sri Diana, Sp.P, Dokter spesialis paru, menyatakan terjadi tren kunjungan pasien terinfeksi Covid-19 yang lebih banyak dari biasanya. “Kita masih terus bertempur dengan pasien-pasien Covid-19 di IGD. Kita masih bantu pasien yang saya kira hampir sama dengan beberapa bulan lalu. Namun satu bulan ini, sayangnya, meningkat dengan cepat sekali. Kasus-kasus yang datang pun trennya berbeda. Biasanya pasien-pasien yang datang masih harus kita curigai Covid-19, harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kebanyakan mereka sekarang datang yang sudah bawa hasil *swab*, mereka yang sudah dalam gejala berat, biasanya mereka yang isoma dulu di rumah, setelah merasa tidak sanggup di rumah, mereka baru datang ke rumah sakit. Itu tren yang sering kita dapati di rumah sakit.”

Dr. Iqbal Elyazar, Peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit menyatakan dengan jelas diperlukannya konsistensi yang tegas dalam implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat. “Sangat penting untuk surat terbuka ini juga diberikan kepada para Gubernur di berbagai daerah. Regulasi yang sudah dikeluarkan banyak, tapi level ketidakpedulian terdapat di daerah-daerah. Tidak hanya di level presiden, karena presiden akan mengeksekusikan kembali kepada Kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya.” Implementasi regulasi pelanggaran protokol kesehatan yang masih longgar juga dijelaskan. “Ada tebang pilih regulasi di mana pejabat melakukan pelanggaran protokol kesehatan tidak terkena sanksi berat, bahkan ASN boleh mudik”

“Masyarakat jangan diiming-imingi bahwa beberapa daerah sudah berkurang zona merahnya, namun data *testing* tidak pernah dibuka. Padahal data *testing* seharusnya menentukan pewarnaan zonasi. Sampai saat ini kita tidak tahu data *testing* di kabupaten/kota lain, selain DKI Jakarta. Para Walikota dan Gubernur perlu menampilkan data *testing* dan menghilangkan narasi zona hijau.”

Anita Siti Fatonah, SKM, *Regional Technical Advisor* Puskesmas Terpadu dan Juara, menjelaskan situasi penanganan wabah di lapangan berdasarkan *dashboard* pemantauan kasus CISDi dan Pemprov Jawa Barat. “Berdasarkan pantauan data harian yang dikembangkan oleh CISDI dan Program PUSPA, dari 3 minggu terakhir itu ada lonjakan kasus 2 sampai 3 kali lipat. Bila dipantau dari akhir Mei, rata-rata puskesmas bisa mendapatkan kasus konfirmasi baru 4 sampai 5 kasus. Pada minggu-minggu terakhir ini, terjadi lonjakan 3 sampai 4 kali lipat, yaitu 12 sampai 13 kasus per hari kalau kita bisa pukul rata dari 100 puskesmas di Jawa Barat dalam Program PUSPA.”

Faisal Basri, MA, Ekonom senior, menyebut kegagalan penanganan wabah terjadi karena hilangnya figur pemimpin “perang”. “Dibutuhkan panglima perang yang jelas hadir dalam penanganan pandemi ini. Kalau panglima tertinggi Presiden, panglima perang yang saat ini adalah Menko Perekonomian. Jadi, yang diurus adalah ekonomi semata sehingga apa-apa yang dibicarakan tentang ekonomi. Padahal selesaikan dulu masalah kesehatan agar pemulihan ekonomi bisa lebih ringan. Selain itu, Indonesia menghadapi Covid-19 yang parah ini karena data yang tidak kunjung beres. Kalau data tidak kunjung beres, percayalah pemerintah tidak akan mampu mengantisipasi kalau *collapse*. Kalau data bagus kita bisa mengetahui *collapse*-nya kapan.”

Diah Saminarsih, *Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO Director General* sekaligus Pendiri CISDI menutup diskusi dengan menyampaikan ringkasan rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan. “Saat ini, kita memiliki pemahaman akan sifat dan karakter virus SARS-COV-2 dengan lebih baik. Namun di saat yang bersamaan, kita juga berhadapan dengan situasi baru; mutasi virus, keterbatasan vaksin hingga infodemik yang semakin parah. Kita bisa menggali pembelajaran dari tingkat global, nasional maupun daerah untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan relevansi dengan kondisi saat ini. Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan termasuk pelaksanaan survei seroprevalensi secara pusat ataupun di daerah-daerah agar ada pemetaan prevalensi infeksi yang jelas di tiap wilayah; prioritas pada penguatan layanan kesehatan primer yang memberdayakan kader kesehatan sebagai penunjang layanan selain sebagai penjaga terdepan sistem kesehatan juga karena biaya yang dibutuhkan untuk transformasi layanan kesehatan primer jauh lebih rendah daripada biaya perawatan di rumah sakit; pemanfaatan dan pendistribusian tes antigen di seluruh daerah dengan ledakan kasus tertinggi untuk memperkuat deteksi dan lacak kasus, serta memastikan konsistensi dan koherensi komunikasi risiko agar tidak ada kebingungan lagi pada risiko COVID-19 dan manfaat vaksinasi. Hal ini akan berdampak pada perilaku masyarakat dalam menaati protokol kesehatan.”

Rekomendasi

Melihat perkembangan lonjakan kasus serta lambannya peningkatan deteksi, lacak dan isolasi kasus Covid-19 yang terjadi saat ini, kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah tegas dan agresif dalam memperkuat sistem kesehatan nasional serta memastikan keadilan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan cara:

1. Memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, prehospital care, rujukan, ambulan dan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas guna mengantisipasi lonjakan kasus.
2. Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

3. Meningkatkan tes dan lacak di beberapa daerah, yang sampai sekarang masih di bawah standar WHO.
4. Menunda pembukaan sekolah tatap muka, sampai terjadi penurunan kasus.
5. Mempercepat vaksinasi gratis untuk semua orang di atas 18 tahun, dengan memprioritaskan pada manusia lanjut usia yang masih belum mendapatkan akses karena berbagai faktor
6. Memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus serta kematian karena Covid-19, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang akurat tentang kondisi pandemi. Menutupi kasus dan kematian, hanya akan membuat masyarakat semakin abai dengan protokol kesehatan.
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagai bentuk penguatan puskesmas selaku garda terdepan layanan kesehatan masyarakat serta relawan COVID-19 termasuk petugas kecamatan/kelurahan/RW.
8. Perkuat fasilitas kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit dengan suplai Alat Pelindung Diri (APD) yang baik dan sesuai standar; pembayaran insentif tenaga kesehatan sesuai tanggal yang dijanjikan; kesediaan alat penunjang kesehatan seperti kasur, tabung oksigen, obat-obatan, fasilitas tes; hingga reaktivasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan tambahan.
9. Menjamin perlindungan tenaga kesehatan serta jaminan insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan.
10. Komunikasikan kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial yang ketat secara konsisten dan terus menerus melalui berbagai kanal media komunikasi yang dimiliki pemerintah nasional dan daerah, pelibatan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan elemen masyarakat lainnya hingga indikator epidemiologi memenuhi standar emas penanganan wabah.

Kami mengajak rakyat Indonesia untuk menandatangani Surat Terbuka di [s.id/SuratTerbuka_DesakanKpdPresiden](https://www.kemkes.go.id/SuratTerbuka_DesakanKpdPresiden).

- SELESAI -

Tentang CISDI

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. Saat ini CISDI mendampingi pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memperkuat upaya tanggap COVID-19 di 100 puskesmas di 12 kota dan kabupaten serta menjalankan program penguatan respon COVID-19 di beberapa wilayah di Indonesia.

Tentang Lapor COVID-19



LaporCovid-19 adalah wadah (platform) sesama warga untuk berbagi informasi mengenai angka kejadian terkait COVID-19 di sekitar kita. Pendekatan bottom-up melalui citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: Website: www.laporcovid19.org , IG: @laporcovid19, Twitter: @laporcovid, FB: Koalisi Warga LaporCovid-19

Narahubung:

Sdr. Amru Sebayang, Content & Media Officer CISDI (0877-8273-4584)

Sdr. Windy, Relawan Lapor COVID-19 (+62881026919144)